

Strategi PDI-Perjuangan Dalam Pemilu Presiden dan Wapres Tahun 2014

Turtiantoro

ABSTRACT

Researchentitle "PDI-Struggle Strategy in Central Java in General Election of President and Vice President in 2014" is a qualitative research that momentum Presidential Election 2014. This study begins from the observation of the PDI-P in Central Java province in Pilgub in 2013 who take a decision to nominate candidates for the pair of internal party, namely Ganjar Pranowo and Heru Sudjarmoko. The success of the PDI-P in the year 2013 was also continued with victory in the legislative elections held in april 2014, PDI-P Central Java Province scooped 27 seats, up four seats compared to the 2009 election. Two such events have a strong attraction for study because in 2014 there was also a general election for president and vice president. On the one hand the PDI-Struggle Central Java two wins in the race for political office, on the other hand suffered two defeats in the presidential and vice presidential elections in 2004 and 2009. For this reason this study was conducted to determine the strategy chosen in the elections until the end proved to victory.

Keywords: *strategy, implementation, victory*

PENDAHULUAN

Dari data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui bahwa dalam pemilu legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak yaitu 23.681.471 atau 18,95% diikuti Partai Golongan Karya (Partai Golkar), 18.432.312 atau 14,75%, ketiga, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), 14.760.371 atau 11,81%. Partai Demokrat yang dalam pemilu 2009 memborong dua kemenangan sekaligus di pemilu legislatif dan pilpres, dalam pemilu legislatif 2014 hanya menduduki peringkat empat dengan perolehan suara 12.728.913 atau 10,19%.

Jokowi yang diusung PDI-Perjuangan sebagai calon presiden mempunyai daya tarik kuat untuk diteliti karena merupakan calon non-struktural partai, merupakan figur yang menapak dari jabatan politik sebagai Walikota Surakarta, kemudian terpilih sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Langkah PDI-P mengusung Jokowi juga merupakan keputusan yang berani dan mengejutkan banyak pihak karena partai yang dibangun di awal reformasi melekat predikat sebagai kendaraan politik trah Soekarno, terutama keluarga Megawati Soekarnoputri. Megawati sebagai Ketua Umum juga punya hak politik mencalonkan diri namun faktanya tidak mengambil kesempatan itu. Berpasangan dengan Jusuf Kalla merupakan pengusaha sekaligus kader Golkar, pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden tahun 2004-2009.

PEMBAHASAN

Ada lima pandangan tentang politik sebagai konsep, *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Ramlan Surbakti, 1992, hlm 1-2). Dari lima pandangan tersebut maka pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden memenuhi rumusan dari

pandangan ketiga yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Lebih tajam lagi bila mengikuti pengertian dari Robson. Menurut Robson sebagaimana disampaikan Ramlan Surbakti, maka ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan.

Dalam pemilu, upaya untuk memengaruhi orang lain (influence) sangatlah penting karena melalui kemampuan tersebut, maka orang lain, terutama yang mempunyai hak pilih diharapkan akan mengikuti gagasan dan kehendak dari para calon yang bersaing dalam meraih kekuasaan. Penggunaan pengaruh adalah tindakan manipulatif karena pemilih tidak sepenuhnya menyadari bahwa dirinya telah digiring agar berperilaku dan mematuhi kehendak calon. Untuk itu dibutuhkan strategi agar orang lain mengikuti kehendaknya dan strategi yang tepat haruslah merupakan pilihan yang cocok.

Strategi berasal dari bidang militer, dari bahasa Yunani : *strat-egia*, berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan. Pengertian strategi untuk kemudian diadopsi bidang politik karena pengerahan dan/atau menggerakkan massa dalam jumlah banyak untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh kekuasaan politik juga harus dilakukan terutama melalui pemilihan umum.

Walaupun istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, hendaknya tidak menimbulkan kesan bahwa sebelum itu tidak ada strategi. Setiap pemikiran dan perencanaan yang terfokus yang kemudian diwujudkan secara nyata merupakan perencanaan strategis (Peter Schroder, 2004, hlm 4).

Clausewitz menjelaskan bahwa tujuan strategi bukanlah kemenangan yang nampak di permukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya. Pengertian ini sangatlah penting bagi perencanaan strategi politik (Peter Schroder, 2004, hlm 5). Strategi terarah pada satu tujuan utama, tujuan ini harus dicapai, dan untuk itulah dibutuhkan persyaratan-persyaratan melalui perencanaan (Peter Schoder, 2004, hlm 13).

Perencanaan merupakan pemikiran dan perumusan yang meliputi cara bersikap, tujuan dan alternatif untuk bersikap/bertindak, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi untuk mewujudkan secara rasional. Pemikiran dan perumusan ini dilakukan secara sistematis dan mengarah ke depan. Menurut Peter Schroder, langkah-langkah konseptual dalam perencanaan strategis terdiri dari tiga fase yaitu :

1. Tugas dan Analisis Situasi;
2. Keputusan Strategis;
3. Implementasi Strategi.

Kekalahan PDI-Perjuangan dalam pilpres 2004 dan 2009 yang diikuti keputusan berada di luar pemerintah (2004-20014) tidak berlaku di daerah seiring dengan kebijakan desentralisasi yang mengatur adanya pembagian daerah otonom Provinsi, Kabupaten/Kota. Jumlah kursi yang turun di Provinsi Jawa Tengah dari 31 di tahun 2004 menjadi 23 di tahun 2009 tetap menempatkan PDI-Perjuangan sebagai pemilik kursi mayoritas sedangkan di tingkat nasional, Partai Demokrat memborong kemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden. Keputusan politik untuk merada di luar pemerintah (eksekutif) selama dua kali priode pemilu

belakangan terbukti merupakan keputusan politik yang tepat karena pada pemilu legislatif nasional tahun 2014 PDI-Perjuangan kembali mengambil posisi sebagai pemenang, demikian pula di Jawa Tengah, perolehan kursi PDI-Perjuangan naik dari 23 kursi di tahun 2009 menjadi 27 kursi di tahun 2014.

Pemilu tahun 2014 menarik untuk dikritisi karena terjadi pergeseran kekuatan politik Partai Demokrat. Di Jawa Tengah partai ini mengalami penurunan jumlah kursi dari 16 di tahun 2009 dan menduduki peringkat dua setelah PDI-Perjuangan menjadi peringkat enam di pemilu 2014 dengan perolehan 9 kursi atau kehilangan lima kursi. PDI-Perjuangan naik dari sebelumnya 23 kursi menjadi 27 kursi. Kenaikan jumlah kursi tersebut semakin memantapkan PDI-Perjuangan Jawa Tengah sebagai partai yang kedudukannya tidak tergoyahkan sejak pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014, tidak pernah bergeser dari peringkat satu. Dari seluruh anggota DPRD (Gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota), yaitu 1585 orang maka 416 orang atau 26,25 merupakan anggota DPRD dari PDI-Perjuangan. Jumlah tersebut merupakan modal politik yang cukup besar untuk didayagunakan dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden, apalagi bila ditambah dengan koalisi pendukung.

Joko Widodo diputuskan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2014 pada hari Kamis 17 Maret di rumah Megawati Soekarnoputri Jl Teuku Umar 27A Menteng Jakarta. Keputusan ini adalah informasi yang ditunggu pendukung Jokowi setelah hari-hari sebelumnya banyak pihak berspekulasi siapakah yang akan tampil sebagai calon presiden dari PDI-Perjuangan. Jumat siang tanda-tanda deklarasi makin jelas ketika Jokowi Sholat Jumat di Masjid Al Alam Marunda dan setelahnya mengunjungi kelurahan itu yang juga dikenal sebagai tempat tinggal Si Pitung, tokoh legenda Betawi. Setelah masuk ke rumah Si Pitung, Jokowi membacakan keputusan Megawati : *“Dengan mengucapkan Bismillah-hirrohmanir-rohim, saya siap melaksanakan, setelah itu diikuti dengan adegan mencium Bendera Merah Putih”*.

Keputusan menampilkan Jokowi sebagai Calon Presiden merupakan langkah berani dan mengejutkan banyak pihak karena Megawati sebagai ketua umum partai masih berhak untuk tampil lagi sebagai calon. Selain itu Joko Widodo bukanlah pihak yang berada di struktural partai. Joko Widodo juga tidak mempunyai garis “trah” Soekarno. PDI-Perjuangan juga memiliki kader lain yang layak dicalonkan seperti misalnya Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), Puan Maharani (Ketua Partai) yang juga anak kandung Megawati. Ada keawatiran bahwa bila kembali mencalonkan Megawati yang pernah dua kali kalah dalam pemilu tahun 2004 dan 2009 akan terulang menjadi yang ketiga kalinya sehingga kembali pada pertanyaan siapa yang akan dicalonkan. Hasil pemilu legislatif 2014 memberi sinyal partai pemenang tidak bisa mengusung calon presiden tanpa koalisi dengan partai lain karena kekurangan modal politik yaitu syarat minimal kemenangan 20%. Modal politik di bawah target tidak menyurutkan langkah untuk berlaga di Pemilu Presiden/Wakil Presiden sebab seberapapun besarnya kemenangan tetaplah kemenangan dan Megawati dengan sumringah memuji kader-kadernya yang telah bekerja keras. Kemenangan ini tak bisa diraih tanpa kegigihan, kesabaran, dan ketekunan kader. kemenangan Ganjar Pranowo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 sebagai pengalaman.

Mengulur waktu dalam pencalonan Jokowi adalah bagian dari strategi PDI-Perjuangan untuk mendorong kadernya bekerja keras melakukan konsolidasi untuk memenangkan pemilu legislatif namun dengan elektabilitas Jokowi yang menurun, maka faktor gerak maju partai-partai lain menjadi perhitungan tersendiri. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli mengatakan bahwa pada malam pendeklarasian Jokowi,

hampir seluruh partai mengadakan rapat merumuskan strategi baru kampanye guna menghadang perolehan suara PDI-Perjuangan (Tempo, 14-21 April, 2014).

Upaya pihak lawan untuk menghadang gerak maju Jokowi dilakukan melalui berbagai media secara legal maupun ilegal. Ada pihak yang mengorek kepemimpinannya ketika menjadi Walikota Surakarta dengan membidik PAD yang turun di sektor tertentu tanpa menelusuri sebab terjadinya penurunan. Padahal yang terjadi adalah ada penghapusan atau peniadaan biaya retribusi untuk jenis layanan tertentu sehingga tidak lagi menjadi sumber pendapatan, sedangkan sumber-sumber perolehan lain mengalami kenaikan tidak dipersoalkan. Melalui dunia maya dilakukan berbagai cara untuk menjauhkan pamor dan dukungan massa terhadap Jokowi. Dikatakan bahwa Jokowi sebagai keturunan Cina, beragama Katolik, orang tuanya simpatisan partai komunis. Untuk tujuan menggajal pamor Jokowi, lawan politik juga mencetak tabloid yang isinya memperlihatkan tidak ada sisi baik dari Jokowi.

Untuk melawan kampanye hitam maka ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Jokowi beragama Islam dengan menyebarkan bukti foto ketika menjalankan ibadah haji, juga ada satu bukti ketika Jokowi di tanah suci foto berjejeran dengan Tantowi Yahya, salah satu Wakil Sekjen Partai Golkar yang juga juru bicara kelompok pesaing. Terbit pula tabloid yang menjelaskan bahwa Jokowi seorang muslim yang bersahaja. Strategi yang diterapkan PDI-Perjuangan dalam Pilpres 2014 bermodal kekuatan yang dimiliki di jalur struktural, non struktural (DPR dan DPRD), para tokoh, para kader dan simpatisan yang tampil secara kolektif atau perorangan. Selain itu “secara alamiah” berbagai kalangan di masyarakat berhimpun dalam kelompok relawan yang kemudian diakomodasi oleh PDI-Perjuangan sehingga gerakan pemenangan lebih terorganisir namun masing-masing kelompok secara leluasa berkreasi untuk menunjang pelaksanaan kampanye. Inisiatif masyarakat yang berhimpun dalam kelompok relawan Jokowi-JK merupakan fenomena baru dalam Pilpres 2014, tumbuh tanpa komando terpusat, mandiri, dinamis.

Menurut Sekjen Seknas Jokowi-Jk, apa yang dilakukan relawan justru melebihi yang dilakukan kader di berbagai tingkatan. Strategi pemenangan di tingkat nasional juga dilakukan dengan mengamati kampanye yang dilakukan lawan politik untuk kemudian melakukan kegiatan yang lebih punya magnet untuk menarik massa. Ada kejadian menarik ketika video kampanye Prabowo Subianto oleh penyanyi Ahmad Dhani yang berbusana mirip elite tentara Nazi Jerman dan publik bereaksi negatif. Rekaman itu dikritik dunia internasional karena dianggap tidak sensitif terhadap korban kekejaman pemimpin Nazi di Jerman, Adolf Hitler pada Perang Dunia II, apalagi Dhani menggunakan nada lagu *band rock Queen, We Will Rock You*, tanpa izin pemilik hak ciptanya. (Tempo, 14-20 Juli 2014). Hasilnya bukannya mendulang tambahan dukungan malahan kontra produktif dan bahan cemooh masyarakat. Kejadian itu menginspirasi pentingnya artis untuk terlibat secara langsung karena mereka punya banyak penggemar dan riil dari pemilih pemula, kata Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan (Tempo, 14-20 Juli, 2014).

Gagasan menggarap pemilih pemula sekaligus melawan kampanye hitam dilakukan dengan strategi ganda dan serangan balik masif melibatkan artis panggung dan memanfaatkan media sosial. Strategi ini ditempuh karena tingkat keterpilihan sempat anjlok ketika Jokowi-Jk tampil kurang prima dalam kampanye debat pertama yang disiarkan langsung televisi nasional. Dari komunitas film bergabung sutradara, pemain film, presenter, dan

komedian seperti Riri Riza, Mira Lesmana, Ringgo Agus Rahman, Sarah Sechan, Panji Pragiwakoso. Teten Masduki bergerak menghubungi kalangan pemusik seperti Slank, Bimbo, Wali dan menggerakkan relawan media sosial. Langkah ofensif dan serangan masif ini menjadi pilihan karena serangan lawan cenderung masif dan sistematis melalui media sosial dan tabloid *Obor Rakyat* dilawan dengan menerbitkan brosur dan tabloid *Obor Rahmatan Lil Alamin*.

Tawaran dan kesempatan yang melibatkan artis tidak selalu ditanggapi secara lugas. Ada yang bersedia bergabung tapi tidak secara terbuka dengan pertimbangan penggemarnya berada di dua kubu atau diprotes penggemar yang mendukung pesaing Jokowi, namun banyak pula yang secara terbuka mengambil pilihan mendukung Jokowi. Efek kampanye melalui media sosial ternyata hasilnya luar biasa, banyak yang awalnya akan memilih Prabowo berbalik karena setuju dengan alasan logis Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyodorkan angka tingkat keterpilihan dua kandidat presiden pada tanggal 2-5 Juli 2014 di 33 provinsi dengan data mengejutkan ; Jokowi mendapat rasio 47,8% sedangkan Prabowo 44,2%. Selain itu di perdesaan dengan 2.400 responden secara acak, LSI juga menyajikan gambaran optimis karena Jokowi memberi harapan praktis berupa Kartu Pintar dan Kartu Sehat, pembangunan irigasi serta bantuan Rp 1,4 milyar perdesa dianggap pemilih sebagai program yang akan direalisasi Jokowi bila menjadi presiden.

Strategi dan seluruh rangkaian kegiatan kampanye bermuara pada konser Salam Dua Jari-(Nomor Urut Jokowi-Jk) di Gelora Bung Karno Jakarta pada hari sabtu menjelang hari/masa tenang. Konser tersebut sukses besar dilihat dari jumlah artis yang terlibat (group /perorangan), jumlah penonton. Sukses tersebut menjadi berita yang terus diulang media televisi dan berdampak luas terhadap minat pemilih karena pentas di Gelora Bung Karno menghadirkan fenomena yang berbeda dibanding umumnya kampanye. Hadir spontan, berasal dari berbagai kalangan, tidak ada atribut partai, yang kesemuanya itu menunjukkan Jokowi-Jk didukung secara sukarela oleh berbagai elemen masyarakat.

Implementasi strategi PDI-Perjuangan di Jawa Tengah dalam Pilpres 2014 pada dasarnya mengikuti langkah yang dilakukan pusat dengan berbagai penyesuaian terutama dalam mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki. Ada empat “markas” atau sekretariat Pilpres Jawa Tengah yaitu :

1. Menempati Kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Brigjen Katamso No.24 Semarang. Kantor ini difungsikan untuk menggerakkan segenap elemen partai secara struktural dan non struktural, melakukan koordinasi dengan DPD-PDI Perjuangan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dengan partai pendukung Jokowi-Jk yaitu PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI;
2. Menempati Jl. Pandanaran No.15 yang sehari-hari merupakan tempat tinggal dan tempat usaha kader NU. Sekretariat ini memfasilitasi dan mengakomodasi partisipan yang berasal dari relawan. Bila Kantor DPD PDI-Perjuangan Jawa Tengah sebagai penggerak utama terletak di kawasan timur, maka sekretariat ini terletak di kawasan tengah atau pusat kota, tidak hanya strategis karena mudah dijangkau, juga merupakan lokasi pusat belanja oleh-oleh khas Semarang dan mudah melakukan koordinasi dengan markas Jl Brigjen Katamso karena berada di garis lurus mata angin dari tengah kota ke arah timur atau dari DPD PDI-Perjuangan ke arah pusat kota;

3. Menempati Jl Pamularsih 34 Semarang, difungsikan sebagai sekretariat gabungan dari PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, dan PKPI.
4. Masing-masing kantor DPD partai pendukung Jokowi-Jk yaitu Kantor DPW PKB di Jl Raya Mangkang, Partai Nasdem Jl Pemuda, Kantor Partai Hanura di Jl. Diponegoro, dan PKPI di Jl. Sultan Agung.

PDI-Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif di pusat dan pemenang di Jawa Tengah adalah penggerak utama pilpres 2014 dengan mengandalkan pengurus DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota terpilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kepala daerah/wakil kepala daerah yang berasal dari PDI-Perjuangan. Langkah konkrit untuk menggalang massa dilakukan secara sporadis dan silmutan dengan menghadirkan tokoh dan juru kampanye nasional yang berasal dari seluruh partai gabungan pendukung Jokowi-JK. Untuk calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dari PDI-Perjuangan atau partai pengusung konsentrasi gerakan ada di Dapil dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Dari pergerakan kegiatan kampanye Pilpres nampak bahwa jalur struktural, non struktural, partai pengusung maupun relawan bisa diandalkan karena masing-masing mempunyai motivasi dan semangat yang sama, memenangkan Jokowi-Jk. Ada pula faktor yang menguntungkan yang datang dari lawan politik yaitu ketika Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta mengatakan bahwa Jawa Tengah sebagai basis kaum nasionalis/kandang banteng adalah mitos, diucapkan ketika pemilu legislatif masih bergema di Pilpres dan ucapan itu malahan menguntungkan Jokowi-JK. Sebagian pemilih yang awalnya masih bimbang atau bukan pendukung riil PDI-Perjuangan menjadi tergugah untuk ikut memenangkan Jokowi-Jk karena dianggap sebagai representasi kaum nasionalis. Ucapan Anis Matta mencerminkan dia tidak tahu sejarah dan perkembangan politik Jawa Tengah atau dengan kata lain yang dikatakan tidak dilandasi dasar argumen cukup nalar tentang Jawa Tengah malahan seolah “membangunkan macan tidur”. Kaum nasionalis di Jawa Tengah yang sebelumnya “tidur” atau independen ambil sikap untuk melawan dengan mengambil keputusan mendukung Jokowi-Jk. Selain itu ada pula keuntungan politis ketika Jokowi melontarkan gagasan untuk menjadikan tanggal 1 Muharam (Tahun Baru Islam) sebagai hari santri nasional. Ide tersebut direspon negatif oleh tokoh PKS Fahri Hamzah yang mengemukakan bahwa itu ide sinting. Reaksi publik cukup keras terhadap ucapan Fahri Hamzah dengan melakukan perlawanan. Reaksi paling keras dan gigih dilakukan kaum Nahdyyin (NU) dengan memperkuat konsolidasi dan dukungan untuk mendukung dan membela Jokowi-Jk. Ucapan Fahri Hamzah kontra produktif untuk diri dan partainya serta menjadi bumerang terhadap Prabowo-Hatta sebagai kandidat yang antara lain diusung PKS.

Kemenangan Jokowi-JK di Jawa Tengah awalnya diprediksi tidak sapu bersih seluruh kabupaten/kota bercermin dari hasil pemilu legislatif. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu yang dikawatirkan potensial kalah karena PDI-Perjuangan dalam pemilu legislatif hanya memperoleh 9 kursi. Disamping itu kondisi struktural partai juga kurang solid, ada friksi cukup tajam antara faksi Frans Lukman dengan lainnya. Diketahui bahwa anak dari Frans Lukman (Novita Wijayanti) dalam pemilu 2009 adalah calon terpilih dari PDI-Perjuangan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan suara terbanyak sehingga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014. Namun dalam karir politiknya berkonflik dengan PDI-Perjuangan sehingga Novita mengundurkan diri dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, pada pemilu 2014 menyeberang ke Partai Gerindra, menjadi calon anggota DPR Pusat dan memperoleh kursi di Senayan. Kekawatiran sebagian kalangan PDI-Perjuangan atas kemenangan Novita

di pemilu legislatif berimbang pada Pilpres, ternyata tidak terbukti, di Cilacap Jokowi-Jk tetap unggul dibanding Prabowo-Hatta, demikian pula Kota Pekalongan. Di Kota batik tersebut dalam pemilu legislatif Golkar menang dengan merebut 9 kursi, Gerindra 3 kursi, PKS 3 kursi, PPP 4 kursi, PAN 3 kursi, atau total modal politik koalisi Prabowo-Hatta rajasa 21 kursi, sedangkan modal politik Jokowi Jk yaitu PDI-Perjuangan 4 kursi, PKB 3 kursi atau total hanya 7 kursi sedangkan Hanura dan PKPI tidak memperoleh kursi. Jumlah kursi DPRD yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Hatta Rajasa di Kota Pekalongan memperlihatkan bahwa modal politik di pemilu legislatif tidak terbukti di pilpres. Di Kota Pekalongan Jokowi-JK tetap memperoleh kemenangan dengan selisih cukup meyakinkan.

PENUTUP

Simpulan

1. Bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai modal politik yang cukup kuat untuk bertarung dalam pilpres 2014 karena dalam pemilu legislatif menang di 33 Kabupaten/Kota dan hanya kalah di Kabupaten Rembang (dimenangkan PPP) dan Kota Pekalongan (dimenangkan Golkar). Kemenangan itu juga disemangati oleh kemenangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko dalam Pilkada tahun 2013 sehingga memperkuat rasa optimistik dan percaya diri dalam Pileg dan Pilpres 2014;
2. Strategi PDI-Perjuangan dalam Pilpres 2014 secara konseptual terpusat karena yang dipertarungkan adalah calon Presiden dan Wakil Presiden, namun daerah termasuk Jawa Tengah juga secara konseptual mengambil kebijakan untuk memperkuat langkah-langkah strategis yang disusun secara nasional dengan memanfaatkan potensi dan kondisi riil di Jawa Tengah dengan membentuk tiga sekretariat pemenangan di Jl Brigjen Katamso, Jl Pandanaran, dan Jl Pamularsih, menggerakkan kader struktural dan non struktural di kabupaten/Kota serta menampung dan mengakomodasi keikutsertaan relawan yang datang dari berbagai elemen masyarakat;
3. Tidak melakukan kampanye hitam atau kampanye negatif sebagai strategi memancing lawan politik untuk menjadi pengambil inisiatif, untuk kemudian secara bijaksana dihadapi dengan meluruskan, membuktikan, melakukan bantahan yang akurat dan terpercaya terhadap kampanye hitam dan kampanye negatif yang bersifat menyerang pribadi Jokowi. Pilihan tersebut nampaknya cukup efektif meyakinkan publik dalam menambah dukungan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Maulana Eko, *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Multicerdas Publishing, Jakarta, 2012.
- Aspinall Edward and Mietzner Marcus (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2010.
- Burn Mac gregor James, *Transforming Leadership*, Grove Press, New York, 2003.
- Princes Z. Heflin, *Manajemen Strategik, Resep Daya Saing Unggul*, Mida Pustaka, Yogyakarta, 2006.
- Hunger J David & Wheelen L. Thomas, *Manajemen Strategis*, Andi Yogyakarta, 2003
- Kaligis A.W. Retor, *Marhaen dan Wong Cilik*, Marjin Kiri, Tangerang, 2014.
- Katz S. Richard, *Hanbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung, 2014
- Linz J. Juan and Stepan Alfred, *Problem of Democratic Transition and Consolidation : Shouthern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, John Hopkins University Press Baltimore and London. Denzin K.
- Norman and Lincoln S. Yvonna, *Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Nawawi Hadari, *Manajemen Strategis*, Gadjahmada Universty Press, 2005
- Ritzer George, *Teori Sosiologi. Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Puskata Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Schroder Peter, *Strategi Politik*, Fredrich Naumann Stiftung, Jakarta, 2003.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992
- Majalah Tempo edisi 17-23 Maret 2014
- Majalah Tempo edisi 14-20 April 2014
- Majalah Tempo edisi 14-20 Juli 2014